

**PELAKSANAAN KETENTUAN KEWAJIBAN
INVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL
TERHADAP SENI PATUNG SINGA AMBARA DI
KABUPATEN GIANYAR**

Dewa Ayu Putu Feni Darmayanti

Fakultas Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: fenidarmayanti411@gmail.com

ABSTRAK

Dalam penjelasan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang dimaksud dengan Ekspresi Budaya Tradisional mencakup salah satu kombinasi bentuk ekspresi dalam Huruf e yakni seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya, contohnya seni patung singa ambara. Berdasarkan uraian di atas adapun permasalahan yang dibahas adalah Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap seni patung singa ambara di Kabupaten Gianyar dan Bagaimanakah upaya perlindungan hukum kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap seni patung singa ambara di Kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap seni patung singa ambara di Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan ketentuan kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap seni patung singa ambara di Kabupaten Gianyar belum terlaksana. Faktor-faktor yang menyebabkan belum terlaksananya ketentuan kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap seni patung singa ambara di Kabupaten Gianyar adalah dari faktor pemahaman hukum, faktor lingkungan, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor kebudayaan. Upaya perlindungan hukum kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap seni patung singa ambara di Kabupaten Gianyar dapat dilakukan dengan upaya perlindungan hukum preventif yaitu dengan mendata, mendokumentasikan serta menginventarisasikan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan seni patung singa ambara. Sedangkan upaya perlindungan hukum represif terkait dengan yang penyelesaian

sengketa dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan, khusus perihal pelanggaran hak cipta tuntutan pidana hanya dapat diajukan berdasarkan laporan/pengaduan yang diajukan oleh pemilik/pemegang hak cipta.

Kata Kunci: Singa Ambara, Ekspresi Budaya Tradisional, Perlindungan Hukum.

